

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Sinyal

Teori sinyal menjelaskan bahwa pada dasarnya laporan keuangan dimanfaatkan perusahaan untuk memberikan sinyal positif atau negatif kepada para pemakainya (Sulistyanto dalam Adhi, 2012). Sinyal-sinyal tersebut dapat berupa laba/rugi yang dialami perusahaan, beban atau biaya yang dikeluarkan perusahaan, dan/atau data-data keuangan lainnya (Adhi, 2012).

Sinyal-sinyal juga dapat dilakukan perusahaan pada laporan tahunannya dengan memberikan informasi yang lengkap dan transparan. Hal ini dapat memberikan sinyal-sinyal positif dari perusahaan kepada stakeholders yang dapat berpengaruh terhadap keputusan bisnis yang akan diambil. Dalam hal pengungkapan informasi yang lengkap dan transparan ini dapat dilakukan dengan cara pengungkapan informasi yang bersifat sukarela. Transparansi tersebut dapat menyebabkan para *stakeholder* mendapatkan informasi yang lebih baik dan akan mengurangi potensi terjadi asimetri informasi.

Pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya melalui karakteristik-karakteristik yang ada pada perusahaan itu sendiri. Karakteristik-karakteristik tersebut diantaranya adalah struktur perusahaan, kinerja perusahaan dan pasar perusahaan. Karakteristik-karakteristik perusahaan tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap luas

pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan. Artinya, karakteristik-karakteristik perusahaan secara tidak langsung akan berdampak pada tinggi rendahnya sinyal-sinyal yang dikirimkan perusahaan terhadap *stakeholders*.

Bagi investor, pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan dapat menambah informasi yang diterima dalam rangka pengambilan keputusan. Informasi tambahan tersebut juga dapat digunakan oleh pemakai laporan keuangan untuk memperkirakan pengembalian yang akan diterima oleh investor di masa yang akan datang (*cost of equity capital*). (setyaningrum, 2013).

2.1.2 Karakteristik Perusahaan

Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat dalam suatu entitas usaha yang dapat dilihat dari beberapa segi, diantaranya jenis usaha atau industri, struktur kepemilikan, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan (Safitri, 2008). Benardi dkk. (2009) mengatakan bahwa karakteristik suatu perusahaan dapat dilihat dari beberapa faktor, misalnya bidang usaha, pasar, dan sumber daya. Oleh karena itu dalam konteks laporan keuangan Benardi dkk. (2009) mengklasifikasikan karakteristik perusahaan menjadi tiga kategori, yaitu struktur perusahaan, kinerja perusahaan dan pasar perusahaan.

Karakteristik perusahaan diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu struktur perusahaan yang terdiri dari variabel ukuran perusahaan dan *leverage*; kinerja perusahaan yang tercermin dalam profitabilitas dan likuiditas; dan pasar perusahaan yang menggunakan KAP dan umur *listing*.

2.1.2.1 Ukuran Perusahaan

2.1.2.1.1 Pengertian Perusahaan

Menurut Swastha dan Sukotjo (2002:12) pengertian perusahaan adalah: “...suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan.”

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2012 pengertian perusahaan adalah: “... setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan / atau berkedudukan dalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia.”

Sedangkan menurut Mollengraf yang diahlibahasakan oleh Abdulkadir Muhammad (2002: 7), pengertian perusahaan adalah: “... keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.”

Dapat disimpulkan bahwa pengertian perusahaan adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memuaskan kebutuhan dan bertujuan memperoleh keuntungan atau laba dengan cara bertindak memperdagangkan atau menyerahkan barang.

2.1.2.1.2 Jenis-jenis perusahaan

Sukirno (2011:190) menjelaskan bahwa organisasi perusahaan dapat dibedakan kedalam tiga bentuk organisasi yang pokok, yaitu:

1. Perusahaan perseorangan
Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh satu orang sehingga pemiliknya memiliki kebebasan yang tidak terbatas. Ia sepenuhnya menguasai perusahaan dan dapat melakukan apapun tindakan yang dianggapnya untuk menguntungkan usahanya.
2. Firma
Firma merupakan organisasi yang dimiliki oleh beberapa orang. Mereka sepakat untuk menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Modal perusahaan berasal dari para anggotanya, adakalanya mereka juga meminjam modal dari lembaga-lembaga lain.
3. Perseroan Terbatas
Perusahaan-perusahaan besar kebanyakan berbentuk perseroan terbatas. Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dapat mengumpulkan modal dengan mengeluarkan saham.

Ketiga bentuk organisasi atau perusahaan tersebut merupakan badan usaha swasta yang artinya didirikan oleh orang atau badan swasta. Bentuk organisasi atau perusahaan tersebut bergerak pada kegiatan usaha yang berbeda-beda, sehingga bentuk perusahaan itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa kategori.

Menurut Hery (2016:2), ditinjau dari jenis usahanya (produk yang dijual), perusahaan dibedakan menjadi:

1. Perusahaan Manufaktur (*Manufacturing Business*).
Perusahaan jenis ini terlebih dahulu mengubah (merakit) input atau bahan mentah (raw material) menjadi output atau barang jadi (*finished goods/final good*), baru kemudian dijual kepada para pelanggan (distributor). Contoh perusahaan manufaktur, diantaranya adalah: perusahaan perakitan mobil, komputer, perusahaan pembuat (pabrik) obat, tas, sepatu, pabrik penghasil keramik, dan sebagainya.
2. Perusahaan Dagang (*Merchandising Business*)
Perusahaan jenis ini menjual produk (barang jadi), akan tetapi perusahaan tidak membuat/menghasilkan sendiri produk yang akan dijualnya melainkan memperolehnya dari perusahaan lain. Contoh perusahaan dagang diantaranya adalah: Indomaret, AlfaMart, Carrefour, Gramedia, dan sebagainya.
3. Perusahaan jasa (*service business*)
Perusahaan jenis ini tidak menjual barang tetapi menjual jasa kepada pelanggan. Contoh perusahaan jasa diantaranya adalah: perusahaan yang

bergerak dalam bidang pelayanan transportasi (jasa angkut), pelayanan kesehatan (rumah sakit) dan sebagainya.

2.1.2.1.3 Pengertian Ukuran Perusahaan

Menurut Machfoedz (1994) dalam Widaryanti (2009) ukuran perusahaan adalah:

“...suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, log *size*, nilai pasar saham, dan lain-lain). Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total aset perusahaan.”

Menurut Butar dan Sudarsi (2012) pengertian ukuran perusahaan adalah:

“... nilai yang menunjukkan besar/kecilnya perusahaan.”

Menurut Bambang Riyanto (2008:313) pengertian ukuran perusahaan adalah: “...Besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva.”

Menurut Kurniasih (2012:148) pengertian ukuran perusahaan adalah:

“...nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan.”

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala untuk menunjukkan besar atau kecilnya perusahaan dengan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva.

2.1.2.1.4 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, klasifikasi ukuran perusahaan dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut UU No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
 2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
 3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
 4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Pengelompokan ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 pasal

6 adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

SK Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 11/MIND/PER/2014 tentang program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan industri kecil dan industri menengah mengelompokkan perusahaan dengan didasarkan pada nilai aset yang dimiliki perusahaan seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat 1, yang menyatakan bahwa:

“Kriteria industri kecil dan industri menengah adalah:

(a) Industri kecil yaitu industri dengan nilai investasi paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (b) Industri menengah yaitu industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), termasuk tanah dan bangunan tempat usaha”.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa industri besar yaitu industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

2.1.2.1.1 Metode Pengukuran

Untuk melakukan pengukuran terhadap ukuran perusahaan Prasetyantoko (2008:257) mengemukakan bahwa: “Aset total dapat menggambarkan ukuran perusahaan, semakin besar asset biasanya perusahaan tersebut semakin besar.”

Menurut Kurniasih (2012:150) ukuran perusahaan diukur melalui:

“Ukuran Perusahaan = Ln Total Aktiva”

Menurut Jogiyanto Hartono (2013:282): “Ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva”.

A. Pengertian Aset

Menurut walter T. Horison jr. et. Al yang diahlibahasakan oleh Gina Gania (2013:11) pengertian aset adalah:“...sumber daya ekonomi yang dikendalikan oleh entitas yang diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi dimasa mendatang bagi entitas”

Menurut James R. Reeve et. al. yang diahlinahasakan oleh damayanti Dian (2013:5) , pengertian aset kadang juga disebut aktiva atau harta adalah berikut: “... sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. Sumber daya tersebut dapat berupa benda yang mempunyai wujud fisik, seperti kas dan bahan habis pakai, atau benda yang tidak berwujud tapi memiliki nilai, seperti hak paten”.

Menurut Firdaus A. Dunia (2013:26) adalah sebagai berikut: “...sumber daya yang dimiliki perusahaan yag memberi manfaat ekonomi dimasa depan”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bagwa aktiva/aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat memberi manfaat ekonomi di masa depan.

B. Jenis-jenis aset

Menurut Walter T. Harisson jr. *et.al.* yang diahlibahasakan oleh Gina Gania (2013:20) terdapat dua kategori aset yang utama, yaitu:

1. Aset lancar
2. Aset tidak lancar (yang kadang-kadang disebut jua sebagai jangka panjang)

Penjelasan dari dua kategori aset di atas adalah sebagai berikut: Menurut Walter T. Harisson Jr. et. al. yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2013:20) aset

lancar adalah:“ ...aset yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi selama 12 bulan ke depan atau dalam siklus operasi bisnis. Aset lancar pada umumnya meliputi kas, investasi jangka pendek, piutang (juga disebut debitor), persediaan barang dagang, dan beban dibayar di muka”.

Menurut Kasmir (2012:134) pengertian Aktiva lancar adalah:

“...harta perusahaan yang dapat dijadikan uang dalam waktu singkat (maksimal satu tahun). Komponen aktiva lancar meliputi kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, biaya dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, pinjaman yang diberikan, dan aktiva lancar lainnya.”

Sedangkan menurut Wien's Anorga (2009:265) yang dimaksud aktiva lancar yaitu:

“aktiva yang dengan mudah dijadikan uang.”

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian aktiva lancar adalah aktiva yang dapat dijadikan uang dalam waktu singkat atau kurang dari satu tahun.

PSAK 1 (Revisi 2009) dalam Martani, dkk (2012:140) entitas mengklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

1. Aset diharapkan dapat direalisasikan, atau terjual, atau digunakan dalam siklus operasi normal
2. Aset yang dimiliki dengan tujuan untuk diperdagangkan
3. Aset yang diharapkan akan terealisasi dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan
4. Berupa kas atau setara kas kecuali yang dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan

Menurut Kasmir (2012:39) pengertian aset tetap adalah:

“...harta atau kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan lebih dari satu tahun. Secara garis besar, aktiva tetap terbagi dua macam yaitu aktiva tetap berwujud (tampak fisik) seperti: tanah, bangunan, mesin, kendaraan dan lainnya, dan aktiva tidak berwujud (tidak tampak fisik)

merupakan hak yang dimiliki perusahaan, contoh hak paten. Merek dagang, *goodwill*, lisensi dan lainnya.”

Menurut Wien's Anorga (2009:266), yang dimaksud aktiva tetap yaitu: “aktiva yang sukar dijadikan uang”

Sedangkan menurut Martani, dkk (2012:270), Aset tetap adalah: “...aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi dan penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah aset yang dapat digunakan lebih dari satu tahun dan sulit untuk dijadikan uang.

Menurut Walter T. Harisson Jr. et. al. yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2013:403) menjelaskan aset tidak lancar adalah sebagai berikut: “Kategori utama aset jangka panjang atau tidak lancar adalah properti, pabrik, dan peralatan (property, plant and equipment = PPE) dan aset tidak berwujud. Jenis-jenis aset tidak lancar adalah sebagai berikut:

1. Properti, pabrik, dan peralatan (PPE), yang terkadang disebut aset tetap, adalah aset tidak lancar atau jangka panjang yang berwujud – misalnya, tanah, bangunan, dan peralatan. Aset tersebut digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi; dan diharapkan akan digunakan selama lebih dari satu periode. Alokasi biaya PPE selama umur manfaatnya disebut penyusutan (*depreciation*).
2. Aset tidak lancar konstruksi dalam pelaksanaan (*construction in progress*). Akun ini adalah “*placeholder*” bagi aset yang sedang dibangun. Begitu selesai, biaya aset yang telah diakumulasikan pada akun konstruksi dalam pelaksanaan kemudian dipindahkan ke akun properti, pabrik, dan peralatann/PPE (atau Aset Tidak Berwujud).
3. Aset tidak berwujud (*intangible assets*) adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa substansi fisik. Nonmoneter berarti bahwa aset tidak

diekspresikan dalam jumlah tetap atau jumlah uang yang dapat ditentukan. Aset tidak berwujud tersebut bersifat unik karena tidak memiliki fisik.

4. Properti investasi (*Investment Properties*) sebagai aset lancar. Ini adalah kelas properti bertujuan khusus (tanah dan/atau bangunan) yang dipegang untuk menghasilkan sewa atau apresiasi modal atau keduanya, dan bukan untuk pemakaian yang terkait dengan penjualan, produksi, atau fungsi administrasi”.

2.1.2.2 Leverage

2.1.2.2.1 Pengertian Utang

Menurut Munawir (2010:18) Pengertian Utang adalah: “...semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor”.

Menurut Manurung (2011:79): pengertian utang adalah: “...kewajiban yang timbul akibat transaksi yang telah terjadi dimasa lalu.”

Sedangkan Menurut Achmad Tjahjono (2009 : 152) pengertian utang adalah:“... kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu yang lalu dan harus dibayar dengan kas, barang atau jasa di masa yang akan datang”.

Dari definisi di atas Utang dapat diartikan sebagai kewajiban keuangan perusahaan yang timbul akibat transaksi dimasa lalu dan merupakan sumber dana atau modal perusahaan dimasa yang akan datang dan memberi manfaat bagi perusahaan.

2.1.2.2.2 Jenis-jenis Utang

Di tinjau dari jangka waktu pelunasan atau alat pelunasannya, hutang dapat dibagi menjadi dua kelompok:

1. Utang Jangka Pendek (*Current Liabilities*)

Menurut Manurung (2011:80) Utang Jangka Pendek adalah: "...utang yang harus segera dibayar dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 tahun".

Menurut Jumingan (2008 : 25) hutang lancar adalah: "...kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu normal, umumnya 1 tahun atau kurang semenjak neraca disusun atau hutang yang jatuh temponya masuk siklus akuntansi yang sedang berjalan".

Sedangkan menurut Kasmir (2012:134) utang lancar adalah:

"... kewajiban perusahaan jangka pendek (maksimal satu tahun). Artinya, utang ini harus segera dilunasi dalam waktu paling lama satu tahun. Komponen utang lancar terdiri dari utang dagang, utang bank satu tahun, utang wesel, utang gaji, utang pajak, utang dividen, biaya diterima di muka, utang jangka panjang yang sudah hampir jatuh tempo, serta utang jangka pendek lainnya."

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hutang jangka pendek adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayarkan dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Klasifikasi utang jangka pendek menurut Munawir (2010:18), adalah sebagai berikut:

- a. Hutang dagang, hutang yang timbul karena adanya pembelian barang dagang secara kredit.
- b. Hutang wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang diatur dengan undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu di masa yang akan datang.
- c. Hutang pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun pajak pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara.
- d. Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian (seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena harus segera dilakukan pembayaran.

- e. Penghasilan yang diterima dimuka (*deffered revenue*), adalah penerimaan uang untuk penjualan barang atau jasa yang belum direalisasikan.

2. Utang Jangka Panjang (*Long Term Liabilities*)

Menurut Manurung (2011: 82) utang jangka panjang adalah: "...utang yang tidak harus dibayar segera, tetapi harus dilunasi sebelum jangka waktunya berakhir yang biasanya lebih dari 1 tahun".

Menurut Kasmir (2008 : 34) utang jangka panjang adalah: "...kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun".

Sedangkan menurut Agu Sartono (2015:324) \, utang jangka panjang atau *long term loan* adalah:

"... suatu bentuk suatu bentuk perjanjian antara peminjam dan kreditur dengan kreditur dimana kreditur bersedia memberikan sejumlah tertentu dan peminjam bersedia untuk membayar secara periodik yang mencakup bunga pinjaman."

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan pengertian utang jangka panjang adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan kepada pihak lain dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun akan dilunasi dari sumber-sumber yang bukan dari kelompok aktiva lancar.

Klasifikasi hutang jangka panjang menurut Baridwan (2000:220,365):

a. Hutang Hipotik

Hutang yang timbul berkaitan dengan perolehan dana dari pinjaman yang dijamin dengan harta tetap. Dalam perjanjian biasanya harta yang dijadikan jaminan berupa tanah atau gedung. Jika peminjam tidak melunasi pada waktunya, pemberi pinjaman dapat menjual jaminan tersebut yang kemudian diperhitungkan dengan hutang.

b. Hutang Obligasi

Surat hutang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang beresikeseediaan untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang beserta sejumlah bunga sesuai dengan yang dijanjikan.

2.1.2.2.3 Pengertian *Leverage*

Menurut Agus Sartono (2015:257), pengertian *leverage* adalah penggunaan: "...assets dan sumber dana (*sources of funds*) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham, maka perusahaan menggunakan operating dan *financial leverage*. Sebaliknya *leverage* juga meningkatkan variabilitas (risiko) keuntungan, karena jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya maka penggunaan *leverage* akan menurunkan keuntungan pemegang saham."

Menurut Kasmir (2012:150) yang dimaksud dengan *leverage* adalah: "...rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya seberapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaann dibubarkan (likuidasi)."

Menurut Irham Fahmi (2014:127), pengertian *Leverage* adalah sebagai berikut:

"... mengukur seberapa besar dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori akan masuk dalam kategori *extream leverage* (utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang sangat tinggi dan sulit melepaskan beban utang tersebut."

Menurut Sofyan Syafri, (2015:306) rasio *leverage* yaitu: "... menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (*equity*)".

Menurut Jogiyanto Hartono (2013:282) pengertian adalah: “..nilai buku total utang jangka panjang dibagi dengan total aktiva.”

Menurut Agnes Sawir (2000:13) salah satu rasio *leverage* adalah rasio utang terhadap aktiva atau *Debt to Tottal Asset Ratio* yaitu rasio yang memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi hasil persentasenya cenderung semakin besar risiko keuangannya bagi kreditor maupun pemegang saham

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *leverage* adalah seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang dengan maksud untuk meningkatkan keuntungan potensial.

2.1.2.2.4 Tujuan dan Manfaat Rasio *Leverage*

Menurut Kasmir (2014:153) berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio *leverage* yaitu :

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor);
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menilai dan mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

Sementara itu, manfaat rasio *leverage* adalah:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;

2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menganalisis dan mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.”

Intinya adalah dengan analisis rasio *leverage*, perusahaan akan mengetahui beberapa hal berkaitan dengan penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Setelah diketahui, manajer keuangan dapat mengambil kebijakan yang dianggap perlu guna menyeimbangkan penggunaan modal. Akhirnya, dengan rasio ini kinerja manajemen selama ini akan terlihat apakah sesuai tujuan perusahaan atau tidak (Kasmir 2014:155).

2.1.2.2.5 Jenis-jenis *leverage*

Agus Sartono (2015:259) menyatakan bahwa dalam *leverage* disebutkan adanya operasi, biaya operasi tersebut dibagi kedalam 2 (dua) kategori: biaya variabel dan biaya tetap.

1. Biaya tetap adalah biaya yang dalam jangka pendek tidak berubah karena variabilitas operasi (tingkat output yang dihasilkan) maupun penjualan.
2. Biaya variabel adalah biaya yang dalam jangka pendek berubah karena perubahan operasi perusahaan. Perubahan itu dalam hubungannya dengan perubahan unit yang diproduksi atau karena perubahan unit yang dijual.

Menurut Agus Sartono (2015:260), *leverage* terdiri dari:

1. Leverage operasi (*Operating Leverage*), apabila perusahaan memiliki biaya operasi tetap atau biaya modal tetap, maka dikatakan perusahaan menggunakan leverage dengan mengharapkan bahwa perubahan penjualan akan mengakibatkan perubahan laba sebelum bunga dan pajak yang lebih besar.
2. *Leverage* Finansial (*Financial Leverage*), penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar dari pada beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham.
3. Leverage Kombinasi (*Combined Leverage*), apabila perusahaan memiliki baik operating leverage maupun financial leverage dalam usaha untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham.
4. Analisis *Break-Even*, perencanaan kegiatan dalam perusahaan yang didasarkan atas perkiraan tingkat output. Pemahaman hubungan antara skala perusahaan, biaya operasi dan EBIT pada berbagai tingkat output disebut dengan analisis volume biaya laba atau *cost profit volume analysis*

2.1.2.2.6 Metode Pengukuran *Leverage*

Kasmir (2012:155) mengemukakan bahwa dampak praktiknya, terdapat beberapa jenis rasio *leverage* yang sering digunakan perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio *leverage* antara lain:

1. *Debt to asset ratio (debt ratio)*

Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

Debt to asset ratio dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{total utang}}{\text{total aktiva}}$$

2. *Debt to equity ratio*

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan pemegang (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.

Debt to equity ratio dapat dihitung dengan cara sebagai berikut

$$DER = \frac{\text{total utang}}{\text{total ekuitas}}$$

3. *Long term Debt to equity ratio*

Long Term Debt to Equity Ratio (LTDER) merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

Long term debt to equity ratio dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$LTDER = \frac{\text{total utang jangka panjang}}{\text{total ekuitas}}$$

4. *Times Interest Earned Ratio*

Times Interest Earned yang sering disebut sebagai *coverage ratio* merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga.

Times Interest Earned Ratio dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{laba sebelum bunga \& pajak (EBIT)}}{\text{Biaya bunga}}$$

5. *Fixed Charge Coverage (FCC)*

Fixed Charge Coverage (FCC) atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai *Times Interest Earned Ratio*. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang.

Fixed Charge Coverage (FCC) dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$FCC = \frac{\text{laba sebelum pajak+biaya bunga+kewajiban sewa}}{\text{biaya bunga+ kewajiban sewa/lease}}$$

2.1.2.3 Profitabilitas

2.1.2.3.1 Pengertian laba

Menurut Harahap (2011:309) pengertian laba adalah: "... perbedaan antara *revenue* yang direalisasikan yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut."

Menurut J.Wild (2003:407) yang dialihbahasakan oleh Subrayaman (2012) laba merupakan : "...merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Laba merupakan informasi perusahaan paling diminati dalam pasar uang".

Menurut Dwi Martani (2012:113) laba adalah: "...pendapatan yang diperoleh apabila jumlah finansial (uang) dari aset neto pada akhir periode (di luar dari distribusi dan kontribusi pemilik perusahaan) melebihi aset neto pada awal periode".

Sedangkan menurut Suwardjono (2014:464) laba adalah:

"...kenaikan aset dalam suatu perioda akibat kegiatan kegiatan produktif yang dapat dibagi atau didistribusikan kepada kreditor, pemerintah, pemegang saham (dalam bentuk bunga, pajak dan deviden) tanpa mempengaruhi keutuhan ekuitas pemegang saham semula."

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa laba adalah kenaikan aset dalam suatu periode adanya perbedaan antara penghasilan yang diperoleh perusahaan dari aktivitas operasi pada periode tertentu dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut.

2.1.2.3.2 Jenis-jenis Laba

Laba memiliki beberapa jenis, menurut Kasmir (2011:303) jenis-jenis laba yaitu sebagai berikut:

1. Laba Kotor (*gross profit*) artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh.
2. Laba bersih (*net profit*) merupakan laba yang telah dikurangi biayabiaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak."

2.1.2.3.3 Klasifikasi Laba

Menurut Mulyadi (2001:512) laba dapat diklasifikasikan berdasarkan dua dimensi utama, yaitu:

1. Komponen operasi dan non operasi

Klasifikasi operasi dan non operasi terutama bergantung pada sumber pendapatan atau beban, yaitu apakah pos tersebut berasal dari operasi-operasi perusahaan yang masih berlangsung atau dari aktivitas investasi (pendanaan laba operasi) *operating income*, merupakan suatu pengukuran laba perusahaan yang berasal dari aktivitas operasi yang masih berlangsung laba non operasi, (*non operating income*), mencakup seluruh komponen laba yang tercakup dalam laba operasi.

2. komponen Berulang dan Tidak Berulang

Klasifikasi berulang dan tidak berulang terutama bergantung pada apakah pos tersebut akan terus terjadi atau hanya terjadi satu kali.

2.1.2.3.4 Pengertian Profitabilitas

Menurut I Made Sudana (2011:22) profitabilitas adalah: "...mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan".

Menurut Agus Sartono (2015:122) pengertian profitabilitas adalah: "...kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri."

Menurut Harahap (2015:304) profitabilitas adalah: "...menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah cabang, jumlah cabang, dan sebagainya"

Menurut Irham Fahmi (2011:135), profitabilitas adalah: "...rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi."

Sedangkan menurut Menurut Kasmir (2015:196) profitabilitas adalah: “...rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi.”

Jadi, dapat disimpulkan profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam suatu periode tertentu, dengan mengukur total asset yang dimiliki, penjualan, maupun investasi.

2.1.2.3.5 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Perhitungan rasio profitabilitas memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan di perusahaan. Berikut ini beberapa tujuan dan manfaat menggunakan rasio profitabilitas menurut Kasmir (2015:197), diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
2. untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
6. untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri;
7. dan tujuan lainnya.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah:

1. besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;
2. mengetahui mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
6. manfaat lainnya.

Selain itu, tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan menurut Hery (2016:192) yaitu:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih”.

2.1.2.3.6 Metode Pengukuran Profitabilitas

Beberapa perhitungan Rasio Profitabilitas menurut Agus Sartono (2015:123) yaitu:

1. *Gross Profit margin*

Gross profit margin merupakan persentase laba kotor dibandingkan dengan penjualan (*sales*). Menurut Agus Sartono (2015:123) “... *gross profit margin* sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan, apabila harga pokok penjualan meningkat maka *gross profit margin* akan turun begitupun sebaliknya”.

Gross profit margin dapat dihitung dengan cara:

$$\text{gross profit margin} = \frac{\text{penjualan} - \text{harga pokok penjualan}}{\text{penjualan}}$$

Agus Sartono (2015:123)

2. *Net Profit Margin*

Menurut Munawir (2010:89) yang dimaksud *net profit margin* adalah: “...mengukur tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan dihubungkan dengan penjualannya”.

Agus Sartono (2015:123) menyatakan bahwa “apabila *gross profit margin* selama satu periode mengalami penurunan maka berarti bahwa biaya meningkat relatif lebih besar daripada peningkatan penjualan”.

Net Profit Margin dapat dihitung dengan cara:

$$\text{net profit margin} = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{penjualan}}$$

Agus Sartono (2015:123) :

3. *Returun On Investment / Returun On Asset*

Menurut Agus Sartono (2015:123) yang dimaksud *Returun On Investment / Returun On Asset* adalah: “...menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan”.

Returun On Investment / Returun On asset dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Return on investment} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{total aktiva}}$$

(Agus Sartono, 2015:123)

4. Return On Equity (ROE)

Menurut Agus Sartono (2012:124) yang dimaksud dengan ROE yaitu: “...mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang makin besar maka rasio ini juga akan makin besar”.

Sedangkan menurut Agus Harjito dan Martono (2014:61) ROE yaitu:

“...untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjajdi hak pemilik modal sendiri”.

Return On Equity (ROE) dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal Sendiri}}$$

(Agus Sartono, 2015:124)

5. Earning Power

Agus Sartono (2012:125) mengemukakan bahwa *earning power* adalah: “...tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang digunakan. Rasio ini juga menunjukkan pula tingkat efisiensi investasi yang nampak pada tingkat perputaran aktiva. Apabila perputaran aktiva meningkat dan net profit margin tetap maka *earning power* juga akan meningkat. Dua perusahaan mungkin akan mempunyai *earning power* yang sama meskipun perputaran aktiva dan *net profit margin* keduanya berbeda”.

Earning Power dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{earning power} = \frac{\text{laba penjualan}}{\text{total aktiva}} \times \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{penjualan}}$$

2.1.2.4 Likuiditas

2.1.2.4.1 Pengertian Likuiditas

Menurut Bambang riyanto (2008:25) likuiditas adalah:

“...masalah yang berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Suatu

perusahaan yang mempunyai alat-alat likuid sedemikian besarnya sehingga mampu memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus terpenuhi, dikatakan bahwa perusahaan tersebut likuid, dan sebaliknya apabila suatu perusahaan tidak mempunyai alat-alat likuid yang cukup untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus terpenuhi dikatakan perusahaan tersebut insolva”.

Menurut Suad Husnan (2003:195) likuiditas adalah: “Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi (jangka pendek)”.

Menurut Hanafi dan Halim (2009:74) Rasio likuiditas adalah: “...rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya”

Sedangkan menurut Martono dan Harjito (2003:55) likuiditas adalah: “..Indikator kemampuan perusahaan untuk membayar atau melunasi kewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo dengan mempergunakan aktiva lancar yang dimilikinya”.

Menurut Lukman Syamsudin (2002:41) likuiditas adalah: “...suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas tidak hanya berkenaan dengan keadaan keuangan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuannya untuk mengubah aktiva lancar tertentu menjadi uang kas”.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi finansialnya dalam jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia.

2.1.2.4.2 Tujuan dan Manfaat Likuiditas

Tujuan dan Manfaat Likuiditas menurut Kasmir (2016:132):

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah kewajiban yang berumur di bawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan aktiva lancar.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.
4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang .
6. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

2.1.2.4.3 Metode Pengukuran Likuiditas

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya (aktiva yang akan berubah menjadi kas dalam waktu satu tahun atau satu siklus bisnis). (Hanafi dan Halim, 2009:75). Rumus rasio lancar adalah:

$$\text{rasio lancar} = \frac{\text{aktiva lancar}}{\text{utang lancar}}$$

2. Rasio Cepat (*Quick rasio*)

Rasio ini menggunakan aset-aset yang akan berubah menjadi kas dengan cepat. Karena persediaan dianggap sebagai aktiva lancar yang lama untuk berubah menjadi kas, maka dalam perhitungan *quick ratio* persediaan dikeluarkan dari angka yang dibagi (*numerator*). Dengan demikian, aktiva lancar yang dimasukan adalah kas, surat-surat berharga, dan piutang. (Hanafi dan Halim, 2009:203).

Rumus Rasio Cepat dapat dilihat dibawah ini:

$$\text{quick ratio} = \frac{\text{aktiva lancar} - \text{persediaan}}{\text{utang lancar}}$$

2.1.2.5 Ukuran KAP

2.1.2.5.1 Pengertian Akuntan

Menurut Wien's Anorga (2009:266), yang dimaksud dengan akuntan yaitu: "...seseorang yang ahli dalam akuntansi bertanggung jawab atas pemeliharaan dan analisis atas catatan-catatan perusahaan".

Menurut (Zulaikha:2006), Akuntan adalah: "...profesi dimana memiliki banyak spesialisasi namun salah satu tugas akuntan melakukan audit terhadap laporan keuangan sebuah entitas dan memberikan pendapat terhadap saldo akun dalam laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum dan standar atau prinsip tersebut diterapkan secara konsisten atau tidak".

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 25/PMK.01/2014 pengertian akuntan adalah: “.. seseorang yang telah terdaftar pada register Negara Akuntan yang diselenggarakan oleh menteri.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa akuntan adalah seseorang yang ahli dalam akuntansi dan telah terdaftar pada register Negara akuntan.

2.1.2.5.2 Penggolongan Akuntan

1. Akuntan Publik

Menurut PP nomor 20 tahun 2015 Akuntan Publik adalah: “...seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang”.

Peranan akuntan publik sangat penting dalam perkembangan dunia usaha karena akuntan publik merupakan satu-satunya profesi yang berhak untuk memberikan opini atas kewajaran dari laporan keuangan yang disusun manajemen (Setiyani, 2005).

2. Akuntan Perusahaan

Akuntan perusahaan tugas utamanya adalah menyediakan informasi keuangan. Menurut Setiyani (2005), pekerjaan akuntansi dalam perusahaan dikelompokkan menjadi dua. Pertama, akuntansi manajemen yang berguna menghasilkan informasi khusus bagi pengguna internal seperti manajer dan karyawan yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasikan dan melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam pembuatan perencanaan, pengendalian dan keputusan. Kedua,

akuntansi keuangan berguna untuk menghasilkan informasi bagi pihak internal maupun pihak eksternal, seperti manajer, karyawan, investor, kreditur, maupun pemerintah yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan yang berhubungan dengan perusahaan secara keseluruhan.

3. Akuntan Pemerintah

Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang dimaksud adalah instansi-instansi seperti departemen keuangan, kantor pajak, Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Sarjana akuntansi yang berprofesi sebagai akuntan pemerintah mempunyai status pegawai negeri (Setiyani, 2005).

4. Akuntan Pendidik

akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, yaitu mengajar, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi dan melakukan penelitian di bidang akuntansi (Setiyani, 2005).

Akuntan pendidik dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas penelitian merupakan tugas dari seorang akuntan pendidik, sehingga disamping melakukan pekerjaan mengajar, seorang pendidik juga dituntut untuk mampu melakukan penelitian sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dalam praktek yang sesungguhnya. Seorang akuntan pendidik harus mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat agar seorang pendidik tidak hanya mampu berkomunikasi dengan bidang ilmunya sendiri, namun juga harus mampu

berkomunikasi dengan masyarakat luas, yang merupakan pihak yang tidak mungkin tidak mengenal disiplin ilmu si pendidik (Setiyani, 2005).

2.1.2.5.3 Pengertian KAP

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor: 20 tahun 2015 pengertian KAP adalah: "... badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha".

Rachmawati (2008:3) mengemukakan kantor akuntan publik (KAP) adalah: "...suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktek akuntan publik".

Dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik (2001:20000.1) Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah: "...suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktek akuntan publik".

Pengertian Kantor akuntan publik (KAP) dari berbagai sumber di atas, dapat diinterpretasikan sebagai badan usaha baik perorangan atau persekutuan yang telah mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan yang dipublikasikan oleh seluruh perusahaan yang telah *go public*.

2.1.2.5.4 Pengertian Ukuran KAP

Menurut Devianto (2011) Ukuran KAP adalah: "...Ukuran KAP merupakan pembedaan jumlah klien dan jumlah anggota yang dimiliki oleh suatu kantor

akuntan publik. Ukuran KAP dapat dilihat dari berbagai hal yang terkait dengan KAP, seperti jumlah klien dan jumlah pendapatan KAP”

Menurut Kurniasari (2014) Ukuran KAP adalah:

“...besar kecilnya Kantor Akuntan Publik yang digunakan perusahaan. Ukuran KAP dibedakan dalam dua kelompok yaitu KAP yang berafiliasi dengan Big 4 dan KAP yang tidak berafiliasi dengan Big 4. Ukuran KAP sendiri biasanya dikaitkan dengan kualitas dan reputasi auditor.”

Menurut Ginting dan Fransisca (2014), yang dimaksud dengan ukuran KAP yaitu: “...besar kecilnya KAP yang dibedakan dalam dua kelompok, yaitu KAP yang berafiliasi dengan Big 4 dan KAP yang tidak berafiliasi dengan Big 4.”

Sedangkan menurut Arsih (2015), ukuran KAP adalah:

“...cerminan besar kecilnya Kantor Akuntan Publik, semakin besar Kantor Akuntan Publik maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan, jadi perusahaan akan mengganti auditor dari KAP kecil ke auditor dari KAP besar untuk meningkatkan reputasi dan kualitas laporan keuangannya.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah besar kecilnya Kantor Akuntan Publik yang digunakan suatu perusahaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan. Ukuran KAP dibedakan dalam dua kelompok yaitu KAP yang berafiliasi dengan Big 4 dan KAP yang tidak berafiliasi dengan Big 4.

2.1.2.5.5 Kategori Ukuran Kantor Akuntan Publik

Menurut Arens *et al.* yang diadopsikan oleh Herman Wibowo (2008:32), kategori ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) secara internasional adalah sebagai berikut:

1. Kantor Internasional Empat Besar. Keempat KAP terbesar di Amerika Serikat disebut kantor akuntan publik internasional “*Big Four*”. Keempat kantor ini

memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia. Kantor “*Big Four*” mengaudit hampir semua perusahaan besar baik di Amerika Serikat maupun dunia serta banyak juga perusahaan yang lebih kecil juga.

2. Kantor Nasional. Tiga KAP di Amerika Serikat disebut kantor nasional, karena memiliki cabang di sebagian kota besar kota utama. Kantor nasional memberikan jasa yang sama seperti kantor “*Big Four*” dan bersaing secara langsung dengannya untuk mendapat klien. Setiap kantor nasional berafiliasi dengan kantor-kantor di Negara lain dan karenanya mempunyai kemampuan bertaraf internasional .
3. Kantor Regional dan Kantor Lokal yang Besar. Terdapat kurang dari 200 KAP yang memiliki staf profesional lebih dari 50 orang. Sebagian hanya memiliki satu kantor dan terutama melayani klien–klien dalam jangka yang tidak begitu jauh. KAP yang lainnya memiliki beberapa cabang di satu Negara bagian atau wilayah dan melayani klien dalam radius yang lebih jauh.
4. Kantor Lokal Kecil. Lebih dari 95 persen dari semua KAP mempunyai kurang dari 25 KAP tenaga profesional pada kantor yang hanya memiliki satu cabang, dan entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki satu atau dua klien dengan kepemilikan publik. Banyak kantor lokal kecil tidak melakukan audit dan terutama memberikan jasa akuntansi serta perpajakan bagi klien-kliennya.”

2.1.2.6 Umur *Listing*

2.1.2.6.1 Pengertian Umur *Listing*

Umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan dapat tetap bertahan atau eksis, mampu bersaing, dan memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian (Yularto dan Chariri, 2003, dalam Rini, 2010). Perusahaan yang memiliki umur lebih lama diasumsikan akan meningkatkan praktik pengungkapannya dari waktu ke waktu. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang lebih lama berdiri dianggap telah memiliki lebih banyak pengalaman dalam pengungkapan laporan tahunannya.

Menurut Sabrina (2015) umur *listing* adalah: “...lamanya suatu perusahaan berdiri, umur listing dilihat pada saat penawaran saham pertama kali atau *first issued* (tahun IPO)”.

Menurut Auliya dan Sutono (2015) umur *listing* adalah: “... menunjukkan lama perusahaan tersebut terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan *go public*”.

Menurut Normalita (2014) umur *listing* adalah: “...umur perusahaan ketika mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI)”.

Susanto (1992) dalam Prayogi (2003) mengatakan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia akan memberikan pelaporan keuangan yang lebih lengkap dibanding dengan perusahaan-perusahaan lain. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai pengalaman lebih dalam pelaporan keuangan tahunan. Sri (2007) mengatakan bahwa perusahaan yang lebih lama *listing* menyediakan publisitas informasi yang lebih banyak dibanding perusahaan yang baru saja *listing* sebagai bagian dari praktik akuntabilitas yang ditetapkan oleh BAPEPAM.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa umur *listing* adalah umur perusahaan ketika mencatatkan sahamnya pertama kali di bursa efek.

2.1.2.6.2 Metode Pengukuran

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib untuk mempublikasikan laporan keuangannya sehingga diharapkan perusahaan tersebut

lebih transparan dalam melaporkan laporan keuangannya dibandingkan dengan perusahaan yang belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini pengukuran umur *listing* adalah:

Umur perusahaan = Tahun pengamatan – tahun <i>First Issue</i> (IPO)

(Sabrina:2015)

2.1.2.6.3 Pengetian *Initial Public Offering*

Menurut Hartono dan Ali (2002) yang dimaksud dengan IPO adalah: “... merupakan penawaran saham di pasar perdana yang dilakukan perusahaan yang hendak *go-public*.”

Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal pasal 1 ayat 15 mendefinisikan IPO atau Penawaran Umum sebagai kegiatan penawaran yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang telah diatur dalam undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaan.

Sedangkan menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012:58) Penawaran umum perdana adalah sebagai berikut :

“...Kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten (perusahaan yang akan *go public*) untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang di atur oleh undang-undang yang mengatur tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.”

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan penawaran umum perdana adalah penawaran saham pasar perdana yang dilakukan emiten kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang telah diatur dalam undang-undang pasar modal.

2.1.2.6.4 Manfaat Penawaran Umum atau *Initial Public Offering* (IPO)

Menurut Tjiptono (2006:77), manfaat penawaran umum saham antara lain:

1. Dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus (tidak dengan termin-termin);
2. Biaya *go public* relatif murah;
3. Proses relatif mudah;
4. Pembagian dividen berdasarkan keuntungan;
5. Penyertaan masyarakat biasanya tidak masuk dalam manajemen;
6. Perusahaan dituntut lebih terbuka, sehingga hal ini dapat memacu perusahaan untuk meningkatkan profesionalisme;
7. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta memiliki saham perusahaan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial;
8. Emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat (*go public* merupakan media promosi) secara gratis;
9. Memberikan kesempatan bagi koperasi dan karyawan perusahaan untuk membeli saham.

Sedangkan menurut Darmadji dan Fakhruddin (2001:43) manfaat penawaran umum yaitu:

1. Memperoleh dana segar yang relative besar dan diterima sekaligus.
2. Biaya *go-public* relative murah dan proses relative mudah.
3. Pembagian dividen berdasarkan keuntungan yang diperoleh.
4. Perusahaan dituntut untuk lebih terbuka, sehingga hal ini dapat memacu perusahaan untuk meningkatkan perofesionalisme.
5. Memberikan kesempatan pada masyarakat untuk turut serta memiliki saham perusahaan sehingga lebih dikenal masyarakat.

2.1.2.6.5 Tahap-tahap yang dilakukan dalam Penawaran Umum

Tahap-tahap yang dilakukan dalam melakukan penawaran umum menurut Jogiyanto (2008:85) adalah sebagai berikut:

1. Manajemen harus memutuskan suatu rencana untuk memperoleh dana melalui publik dan rencana ini harus diajukan di rapat umum pemegang saham dan harus disetujui.
2. Perusahaan bersangkutan harus menugaskan pakar-pakar pasar modal dan institusi-institusi pendukung untuk membantu di dalam penyediaan dokumen-dokumen yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut ini.
 - a. *Underwriter* (penjamin emisi) yang akan mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan proses penempatan saham di pasar primer.
 - b. Profesi-profesi yang terdiri dari :
 - kantor akuntan publik yang independen untuk mengaudit laporan keuangan selama dua tahun terakhir dengan pendapat *unqualified opinion*;
 - notaris publik yang akan mempersiapkan dokumen persetujuan dari pemegang saham, persetujuan-persetujuan lainnya yang berkaitan dengan *going public* dan hasil dari rapat-rapat yang dilakukan;
 - konsultan hukum untuk menyediakan opini-opini yang berhubungan dengan hukum;
 - Perusahaan penilai (*appraisal company*) yang akan menilai kembali (jika diperlukan) aktiva-aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan.
 - c. Institusi-institusi pendukung :

trustee untuk mewakili kepentingan dari pemegang obligasi (untuk perusahaan yang akan menjual obligasinya);

 - penjamin (*guarantor*);
 - Biro Administrasi Sekuritas;
 - Kustodian.
3. mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk penawaran umum ke publik.
4. Mempersiapkan kontrak awal dengan bursa.
5. Mengumumkan ke publik.
6. Menandatangani perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan *going public*.
7. Untuk yang akan menjual obligasi, perusahaan harus mendaftarkannya ke agen peringkat untuk mendapatkan peringkat untuk obligasi yang akan ditawarkan. Agen peringkat yang ditunjuk adalah PT Pameringkat efek Indonesia (PEFINDO) yang didirikan pada tanggal 22 Desember 1993.
8. Mengirimkan pernyataan registrasi dan dokumen-dokumen pendukung lainnya ke BAPEPAM-LK.

2.1.3 Pengungkapan Sukarela

2.1.3.1 Pengertian Pengungkapan

Pengungkapan (*disclosure*) menurut Suwardjono (2014:578) yaitu: "...bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan

merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan.”

Menurut evan (2003) dalam suwardjono (2014:578) pengertian pengungkapan adalah: “Pengungkapan yang berarti penyediaan informasi dalam laporan keuangan, termasuk laporan sendiri, catatan atas laporan, dan pengungkapan tambahan yang terkait dengan laporan keuangan, itu tidak mencakup pernyataan publik atau swasta yang dibuat oleh manajemen atau informasi menyediakan di luar laporan keuangan”.

Pengungkapan menurut Hanifa (2002) yaitu: “...membuat sesuatu menjadi diketahui atau mengungkapakan sesuatu secara terbuka”.

Jadi, dapat disimpulkan pengertian pengungkapan adalah bagian integral dari pelaporan keuangan dan diketahui atau mengungkapakan sesuatu secara terbuka.

2.1.3.2 Tujuan Pengungkapan

Menurut Belkaoui dan Riahi (2011:338) yang diahlibahsakan oleh Ali akbar tujuan dari pengungkapan dinyatakan sebagai berikut:

1. Untuk menguraikan hal-hal yang diakui dan memberikan pengukuran yang relevan atas hal-hal tersebut di luar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan.
2. Untuk menguraikan hal-hal yang diakui dan untuk memberikan pengukuran yang bermanfaat bagi hal-hal tersebut.
3. Untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor menilai resiko dan potensial dari hal-hal yang diakui dan tidak diakui.
4. Untuk memberikan informasi penting yang memungkinkan pengguna laporan keuangan melakukan perbandingan dalam satu tahun dan diantara beberapa tahun.
5. Untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk atau arus kas keluar di masa depan.
6. Untuk membantu para investor menilai pengembalian dari investasi mereka.

Sedangkan menurut Suwardjono (2014:580) tujuan pengungkapan yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Melindungi Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naïf perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu pos statemen keuangan. Dengan kata lain, pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan kurang terbuka.
2. Tujuan Informatif Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Tujuan ini biasanya melandasi penyusunan standar akuntansi untuk menentukan tingkat pengungkapan.
3. Tujuan Kebutuhan Khusus Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang memuat pengungkapan secara rinci.

2.1.3.3 Tingkatan Pengungkapan

Terdapat tiga tingkat pengungkapan menurut Evans (2003) dalam Suwardjono (2014:581) yaitu:

1. Pengungkapan cukup (*adequate disclosure*)
2. wajar (*fair disclosure*)
3. Pengungkapan penuh (*full disclosure*)

Evans dalam Suwardjono (2014:581) menyebutkan bahwa tingkat pengungkapan ini mempunyai implikasi terhadap apa yang harus diungkapkan. Tingkat memadai adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar statement keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang terarah.

Tingkat wajar adalah tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang sama. Artinya, tidak ada satu pihakpun yang kurang mendapat informasi sehingga mereka menjadi pihak yang kurang diuntungkan posisinya. Dengan kata lain, tidak ada preferensi dalam pengungkapan informasi. Tingkat penuh menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa perusahaan akan mengungkapkan semua informasi yang diperlukan dalam rangka berjalanya fungsi pasar modal. Pendukung pendapat ini menyatakan bahwa jika suatu informasi tidak diungkapkan hal ini disebabkan informasi tersebut tidak relevan bagi investor atau informasi ini tersedia ditempat lain. Jadi ada pergeseran argumentasi dari informasi yang diberikan oleh akuntan melalui informasi keuangan ke *supplementary information*.

2.1.3.4 Tipe-tipe Pengungkapan

Pengungkapan (*Disclosure*) merupakan sumber informasi untuk pengambilan keputusan investasi. Menurut Hendriksen (2002) yang dihalibahsakan oleh Herman wibowo Informasi yang diungkapkan dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu:

1. Pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*), merupakan pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
2. Pengungkapan sukarela (*voluntary Disclosure*), adalah pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan oleh PSAK no. 1. Selain itu pemerintah melalui BAPEPAM SE-02/PM/2002 juga mengatur mengenai pengungkapan informasi dalam laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pengungkapan informasi yang diatur oleh pemerintah maupun lembaga

professional lainnya (Ikatan Akuntan Indonesia) merupakan pengungkapan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.1.3.5 Pengertian Pengungkapan Sukarela

Berapa bukti menunjukkan bahwa perusahaan yang makin menggantungkan kepada modal intenasional, maka ada kecenderungan perusahaan tersebut mengungkapkan informasi keuangan yang sesuai dengan pasar uang dan modal dimana perusahaan tersebut berharap akan mendapatkan sumber dananya. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan. Pada umumnya salah satu aspek yang digunakan oleh pelaku pasar dalam menilai suatu perusahaan adalah Pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*).

Menurut Suwardjono (2014:583) pengertian pengungkapan sukarela adalah: "...pengungkapan yang di lakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas".

Menurut Healy dan Palepu dalam Wardani (2012) yang dimaksud dengan pengungkapan sukarela adalah: "...satu cara bagi manajer untuk memperbaiki kredibilitas pelaporan keuangannya".

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2014:8) pengertian pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) adalah:

"...keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material dan relvan mengenai perusahaan. Disclosure erat kaitanya dengan transparansi, yaitu perusahaan harus dapat memberikan informasi atau laporan yang akurat dan tepat waktu mengenai kinerja perusahaan".

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan pengungkapan sukarela adalah kemampuan untuk mengungkapkan informasi yang lebih relevan mengenai

perusahaan. Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas bagi perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.

2.1.3.6 Tujuan dan manfaat pengungkapan sukarela

Pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*) memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi bagi pihak diluar perusahaan terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Menurut Suwardjono (2014:580) tujuan dari pengungkapan sebagai berikut :

“Tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Telah disinggung bahwa investor dan kreditur tidak homogen tetapi bervariasi dalam hal kecanggihannya. Karena pasar modal merupakan sarana utama pemenuh dana dari masyarakat, pengungkapan dapat diwajibkan untuk tujuan melindungi, informative, atau melayani kebutuhan khusus”.

Menurut Belkaoui dan Riahi yang diahli bahasakan oleh Ali Akbar (2006:338) tujuan dari pengungkapan sukarela sebagai berikut:

1. Untuk menguraikan hal-hal yang diakui dan memberikan pengukuran yang relevan atas hal-hal tersebut diluar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan.
2. Untuk menguraikan hal-hal yang diakui dan untuk memberikan pengukuran yang bermanfaat bagi hal-hal tersebut.
3. Untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor menilai resiko dan potensial dari hal-hal yang diakui dan tidak diakui.
4. Untuk memberikan informasi penting yang memungkinkan pengguna laporan keuangan melakukan perbandingan dalam satu tahun dan diantara beberapa tahun.
5. Untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk atau arus kas keluar di masa depan
6. Untuk membantu para investor menilai pengembalian dari investasi mereka.

Sementara itu, menurut Choi dan Meek (2010:176) manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. “Dapat mengurangi biaya transaksi dalam memperdagangkan surat berharga yang dikeluarkan perusahaan.
2. Minat analisis keuangan dan investor semakin besar.
3. Meningkatkan likuiditas saham.
4. Biaya modal yang lebih rendah”.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengungkapan sukarela sangat bermanfaat bagi perusahaan. Karena, dapat membantu para investor menilai pengembalian investasi mereka serta dapat menurunkan biaya modal.

2.1.3.7 Metode Pengukuran Pengungkapan Sukarela

Untuk dapat mengukur luas pengungkapan sukarela digunakan indeks pengungkapan sukarela. Indeks ini didapat dengan mengidentifikasi item pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan. Indeks pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan didapatkan dengan cara sebagai berikut:

- a. Memberi skor untuk setiap item pengungkapan dengan ketentuan nilai satu untuk item yang diungkapkan dan nol jika tidak diungkapkan.
- b. Skor yang diperoleh tiap perusahaan dijumlahkan untuk mendapat skor total.
- c. Pengukuran indeks pengungkapan tiap perusahaan dilakukan dengan membagi skor total setiap perusahaan dengan skor total yang diharapkan

$$Disclosure Level = \frac{\text{Jumlah skor disclosure yang dipenuhi}}{\text{Jumlah Skor Maksimal}}$$

Tabel 2. 1
Daftar Item Pengungkapan Sukarela

No.	Daftar Item Pengungkapan Sukarela
1.	Uraian mengenai strategi dan tujuan perusahaan; dapat meliputi strategi dan tujuan umum, keuangan, pemasaran dan sosial.
2.	Uraian mengenai dampak strategi terhadap hasil-hasil pada masa sekarang dan atau masa yang akan datang
3.	Bagan atau uraian yang menjelaskan pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi
4.	Informasi mengenai proyeksi jumlah penjualan tahun berikutnya dapat secara kualitatif atau kuantitatif
5.	Informasi mengenai proyeksi jumlah laba tahun berikutnya, dapat secara kualitatif atau kuantitatif
6.	Informasi mengenai proyeksi jumlah aliran kas tahun berikutnya, dapat secara kualitatif dan kuantitatif
7.	Uraian mengenai kegiatan investasi atau pengeluaran modal yang telah dan atau akan dilaksanakan
8.	Uraian mengenai program riset dan pengembangan yang dapat meliputi kebijakan, lokasi aktivitas, jumlah karyawan dan hasil yang dicapai
9.	Informasi mengenai pesanan-pesanan dari pembeli yang belum dipenuhi dan kontrak-kontrak penjualan yang akan direalisasikan dimasa yang akan datang.
10.	Informasi mengenai analisis pesaing, dapat secara kualitatif atau kuantitatif
11.	Uraian mengenai pemberian kesempatan kerja yang sama ; tanpa memandang suku; agama dan ras.
12.	Uraian mengenai kondisi kesehatan dan keselamatan dalam lingkungan kerja
13.	Uraian mengenai masalah-masalah yang dihadapi perusahaan dalam rekrutmen tenaga kerja.
14.	informasi mengenai level atau fisik output dan pemakaian kapasitas yang dicapai oleh perusahaan pada masa sekarang.
15.	uraian mengenai dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan hidup dan kebijakankebijakan yang ditempuh untuk memelihara lingkungan.
16.	Informasi mengenai manajemen senior yang dapat meliputi nama, pengalaman , dan tanggung jawabnya.
17.	Uraian mengenai pembagian kebijakan-kebijakan yang ditempuh perusahaan untuk menjamin kesinambungan manajemen
18.	Ringkasan statistik keuangan yang meliputi rasio-rasio rentabilitas, likuiditas, dan solfabilitas untuk 5 tahun atau lebih.
19.	Laporan yang memusat elemen-elemen laba rugi yang perbandingan untuk 3 tahun atau lebih.

No.	Daftar Item Pengungkapan Sukarela
20.	Laporan yang memusat elemen-elemen neraca yang diperbandingkan untuk 3 tahun atau lebih
21.	Informasi yang merinci jumlah yang dibelanjakan untuk karyawan yang dapat meliputi gaji atau upah, tunjangan dan pemotongan
22.	Informasi mengenai nilai tambah, dapat secara kualitatif atau kuantitatif.
23.	Informasi mengenai biaya yang dipisahkan kedalam komponen tetap dan variabel.
24.	Mengenai tingkat imbal hasil (<i>return</i>) yang diharapkan terhadap sebuah proyek.
25.	Uraian mengenai dampak inflasi terhadap aktiva perusahaan pada masa sekarang dan atau masa yang akan datang.
26.	Informasi mengenai kemungkinan litigasi oleh pihak lain terhadap perusahaan dimasa yang akan datang.
27.	Informasi mengenai pihak-pihak yang mencoba memperoleh pemilikan substansial terhadap saham perusahaan
28.	Informasi harga saham untuk setiap masa tri wulan untuk 3 tahun atau lebih
29.	Informasi mengenai komposisi karyawan
30.	Informasi mengenai sistem komunikasi dan informasi perusahaan
31.	Informasi mengenai kepala audit internal yang dapat meliputi nama, pengalaman, dan tanggung jawab
32.	Uraian mengenai ringkasan keputusan hasil rapat umum pemegang saham tahunan
33.	Struktur kepemilikan perusahaan dalam bentuk bagan

Sumber :Sehar, et all (2013) dalam Wulandari (2015)

2.1.4 Biaya Modal Ekuitas

2.1.4.1 Pengertian Biaya Modal Ekuitas

Menurut I made sudana (2013:133) pengertian biaya modal (*Cost Of Capital*) sebagai berikut :

“...tingkat pendapatan minimum yang disyaratkan pemilik modal. Dari sudut pandang perusahaan yang memperoleh dana, tingkat pendapatan yang disyaratkan tersebut merupakan biaya atas dana yang diperoleh perusahaan. Besar kecilnya biaya modal suatu perusahaan tergantung pada sumber dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai investasi, khususnya sumber dana yang bersifat jangka panjang”.

Utami (2005) menjelaskan bahwa *cost of equity capital* adalah: “...besarnya rate yang digunakan investor untuk mendiskontokan dividen yang diharapkan diterima dimasa yang akan datang.”

Menurut Toto Prihadi (2013: 437) yang dimaksud dengan biaya modal ekuitas yaitu: ” ...biaya yang timbul dari penggunaan dana yang berasal dari investor, berupa ekuitas.”

Sedangkan menurut Stice Stice Skousen (2009:205) yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar biaya modal ekuitas adalah:“...tingkat pengembalian modal yang diharapkan (baik berupa dividen maupun peningkatan harga pasar dari investasi) yang digunakan untuk menarik investor agar mau memberikan modal ekuitas”.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya modal ekuitas (*cost of equity capital*) adalah tingkat pendapatan minimum yang disyaratkan pemilik modal baik berupa dividen yang akan diterima pada masa mendatang.

2.1.4.2 Manfaat Biaya Modal Ekuitas

Biaya modal ekuitas memiliki banyak manfaat tersendiri bagi pihak manajemen perusahaan. Menurut Yusgiantoro (2006:94) ada tiga alasan mengapa biaya modal dianggap penting yaitu:

- a. Manajemen perusahaan kemudian mampu memahami secara rinci mengenai biaya modal, terutama rincian pembahasan biaya modal sendiri dan pinjaman untuk kemudian mencapai optimasi struktur modal yang diinginkan.
- b. Sangat menentukan keputusan investasi jangka panjang. Dengan tingkat biaya modal yang optimal yaitu yang dapat menghasilkan keuntungan maksimal, maka investasi dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Manajer keuangan memerlukan estimasi biaya modal agar dapat mengambil keputusan yang tepat di bidang penganggaran barang modal.

2.1.4.3 Komponen Biaya Modal Ekuitas

Menurut Utami (2005) biaya modal dihitung atas dasar sumber dana jangka panjang yang tersedia bagi perusahaan. Ada empat sumber dana jangka panjang yaitu:

1. Hutang jangka panjang. Biaya hutang jangka panjang adalah biaya hutang sesudah pajak saat ini untuk mendapatkan dana jangka panjang melalui pinjaman.
2. Saham preferen. Biaya saham preferen adalah deviden saham preferen tahunan dibagi dengan hasil penjualan saham preferen.
3. Saham biasa. Biaya modal saham biasa adalah besarnya rate yang digunakan oleh investor untuk mendiskontokan deviden yang diharapkan diterima di masa yang akan datang.
4. Laba ditahan. Laba ditahan merupakan bagian dari laba tahunan yang diinvestasikan kembali dalam usaha selain dibayarkan dalam kas sebagai deviden.

2.1.4.4 Pengukuran Biaya Modal Ekuitas

Dalam Utami (2005) pengukuran biaya modal saham biasa (biaya modal ekuitas), dipengaruhi oleh model penilaian perusahaan yang digunakan. Ada beberapa model penilaian perusahaan, antara lain:

1. "Model penilaian pertumbuhan konstan (*constant growth valuation model*)
2. *Capital Asset Pricing Model* (CAPM)
3. Model Ohlson"

1. Model penilaian pertumbuhan konstan (*constant growth valuation model*).

Dasar pemikiran yang digunakan adalah bahwa nilai saham sama dengan nilai tunai (*present value*) dari semua deviden yang akan diterima di masa yang akan datang (diasumsikan pada tingkat pertumbuhan konstan) dalam waktu yang tidak terbatas (Model ini dikenal dengan sebutan *Gordon model*). Nilai saham biasa dengan pertumbuhan normal, diformulasikan sebagai berikut :

$$P_0 = \frac{D_1}{k_s - g}$$

Keterangan :

P_0 = Nilai saham biasa perusahaan

D_1 = Dividen pada tahun pertama

K_s = Tingkat hasil/pengembalian minimum saham biasa

g = Tingkat pertumbuhan deviden

2. *Capital Asset Pricing Model (CAPM)*

Berdasarkan model CAPM, biaya modal saham biasa adalah tingkat return yang diharapkan oleh investor sebagai kompensasi atas risiko yang tidak dapat dideversifikasi yang diukur dengan beta. Brigham dan Houston (2011: 351) yang dialibahasakan oleh Ali Akbar Yulianto menyatakan prosedur menggunakan pendekatan CAPM adalah sebagai berikut :

- a. Mengestimasi tingkat bebas risiko (rRF) yang umumnya ditetapkan berdasarkan tingkat suku bunga obligasi atau promes pemerintah.
- b. Tentukan koefisien beta saham (b_i) dan gunakan sebagai indeks risiko saham.
- c. Mengestimasi perkiraan premi risiko pasar, yang merupakan perbedaan antara rata-rata pengembalian yang diminta oleh investor atas saham dengan tingkat bebas risiko ($r_M - r_{RF}$).
- d. Melakukan substitusi nilai-nilai ke persamaan CAPM untuk mengestimasi tingkat pengembalian yang diminta atas saham.

$$r_s = r_{RF} + (r_M - r_{RF}) b_i$$

3. Model Ohlson.

Model Ohlson digunakan untuk mengestimasi nilai perusahaan dengan mendasarkan pada nilai buku ekuitas ditambah dengan nilai tunai dari laba abnormal. Dalam model Ohlson, biaya modal ekuitas dihitung berdasarkan tingkat diskonto yang dipakai investor untuk menilaitunaikan *future cash flow*.

$$P_t = B_t + \sum_{r=1}^T (1+r)^{-r} E_t \{X_{r+1} - rB_{rt-1}\} \dots\dots (1)$$

Keterangan:

P_t = harga saham pada periode t

B_t = nilai buku per lembar saham periode t

X_{t+1} = laba per lembar saham pada periode $t + 1$

r = biaya modal ekuitas

Model yang digunakan Botosan (1997) dalam Utami (2005) memakai model Ohlson untuk mengestimasi biaya modal ekuitas. Botosan (1997) menghitung ekspektasi biaya modal ekuitas dengan menggunakan estimasi laba per lembar saham untuk periode empat tahun ke depan ($t = 4$) dan memakai data *forecast* laba per saham yang dipublikasikan oleh *Value Line*. Di Indonesia publikasi data *forecast* laba per lembar saham tidak ada.

Oleh karena itu, estimasi laba per lembar saham penelitian ini menggunakan *random walk* model. Alasan untuk menggunakan estimasi model *random walk* karena model tersebut dapat digunakan sebagai alternatif dalam mengukur prakiraan laba. Untuk mengestimasi laba per lembar saham pada periode $t+1$ digunakan model *Random Walk* sebagai berikut:

$$E_{(x_{t+1})} + x_t + \sigma \dots \dots \dots (2)$$

$E_{(x_{t+1})}$ = estimasi laba per lembar saham pada periode $t+1$

x_t = laba per lembar saham aktual pada periode t

σ = *Drift term* yang merupakan rata-rata perubahan laba per lembar saham selama 5 tahun

Untuk tujuan estimasi laba satu tahun ke depan ($t+1$) digunakan data rata-rata perubahan laba per lembar saham untuk lima tahun atau sejak *go public* jika emiten belum genap lima tahun menjadi perusahaan *public*. Dengan demikian estimasi *cost of equity* capital pada persamaan (1) dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut :

$$p_t = B_t + (1 + r)^{-1} \{x_{t+1} - rB_t\} \dots \dots \dots (3)$$

x_{t+1} = laba per saham periode $t+1$ yang diestimasi dengan model *random walk* seperti pada persamaan (2). Setelah disederhanakan secara matematik, maka persamaan (3) menjadi :

$$(p_t - B_t) (1 + r) = (x_{t+1} - rB_t)$$

$$r = \frac{(B_t + x_{t-1} - p_t)}{P_t}$$

Keterangan:

r = biaya modal ekuitas

B_t = nilai buku per lembar saham periode t

X_{t+1} = laba per lembar saham pada periode $t+1$

P_t = harga saham pada periode t

Perhitungan *cost of equity capital* berguna untuk menghasilkan pengambilan keputusan investasi yang tepat agar investasi tersebut menghasilkan return yang dapat menyejahterakan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan Sukarela

Lang dan Lundholm (1993) dalam Benardi dkk. (2009) menyatakan bahwa tingkat keluasan informasi dalam kebijakan pengungkapan perusahaan akan meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran perusahaan, hal ini dikarenakan perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki tuntutan publik (*publik demand*) akan informasi yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang berukuran kecil. Marston dan Polei (2004) dalam Sri (2007) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi sehingga investor akan membutuhkan informasi keuangan perusahaan yang lebih banyak untuk membuat keputusan investasi yang lebih efektif.

Wulansari (2008) dalam penelitiannya menemukan bahwa ukuran perusahaan signifikan dan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela. Wulansari (2008) mengatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan,

semakin banyak informasi yang terkandung di dalam perusahaan dan makin besar pula tekanan untuk mengolah informasi tersebut, sehingga pihak manajemen perusahaan akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya informasi dalam mempertahankan eksistensi perusahaan.

Prayogi (2003) menyatakan bahwa perusahaan besar mungkin akan mengungkapkan lebih informasi sebagai upaya untuk mengurangi biaya keagenan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan semakin luas pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan.

Hal ini didukung oleh penelitian Yetty Murni (2016), Nurseti Adhi (2012), Mujiyono (2010) dan Nuryaman (2009) yang mengatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Sukarela.

2.2.2 Leverage terhadap luas pengungkapan sukarela

Setyaningrum (2013) mengatakan bahwa Semakin tinggi tingkat leverage perusahaan berarti semakin tinggi pula ketergantungan perusahaan terhadap pinjaman dari kreditor. Ketergantungan ini menyebabkan munculnya *cost monitoring* karena kreditor harus selalu mengawasi kinerja perusahaan untuk mendapatkan kepastian pengembalian dana yang mereka pinjamkan. Untuk meyakinkan kreditor dan menurunkan *cost monitoring* yang ditanggung perusahaan, manajer melakukan pengungkapan sukarela.

Hal ini didukung oleh penelitian Indra Gunwan (2015) dan Sulung Aniroh (2015) yang mengatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.

2.2.3 Profitabilitas terhadap luas pengungkapan sukarela

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan hubungan antara laba dengan penjualan dan investasi (Van Horne dan Wachowics, 2007). Profitabilitas dapat mencerminkan pengembalian yang diterima oleh pemegang saham. Semakin tinggi profitabilitas tentunya semakin tinggi pula pengembalian yang diterima oleh pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi tentunya lebih menarik bagi investor dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan pada tingkat yang lebih rinci dan lengkap, untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh investor dan pengguna informasi lainnya (Adhi, 2012).

Hal ini didukung oleh penelitian Maya Novitasari (2017), Indra Gunawan (2015), Putu Wisnu Wiguna (2015), Noor Laila (2014), dan Nurseto Adhi (2012) yang mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.

2.2.4 Likuiditas terhadap luas pengungkapan sukarela

Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek (Van Horne dan Wachowics, 2007) dalam Setyaningrum (2013). Kreditor lebih menyukai perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi dibandingkan perusahaan yang memiliki likuiditas rendah. Hal ini disebabkan, perusahaan dengan likuiditas tinggi lebih mampu untuk membayar hutang jangka pendeknya. Hasil penelitian Prayogi (2003) menyatakan bahwa variabel likuiditas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan keuangan

tahunan perusahaan. Hal ini didasarkan pada harapan bahwa kuatnya finansial suatu perusahaan akan cenderung memberikan pengungkapan yang lebih luas daripada perusahaan yang kondisi finansialnya lemah (Prayogi, 2003).

Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan maka semakin kuat kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang kuat akan cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi dibandingkan perusahaan yang kondisi keuangannya lemah. (Bintang, 2011).

Dengan likuiditas yang tinggi berarti perusahaan lebih mempunyai kemampuan untuk membiayai dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengungkapan sukarela. Sehingga perusahaan lebih mampu untuk mengungkapkan dan membiayai kegiatan pengungkapan sukarela yang lebih luas.

Hal ini didukung oleh penelitian Maya Novitasari (2017), dan Indra Gunawan (2015) yang mengatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.

2.2.5 Ukuran KAP terhadap luas pengungkapan sukarela

KAP *big 4* telah memiliki nama baik serta kredibilitas tinggi dalam bidang audit. Perusahaan akan melakukan melakukan pengungkapan sukarela yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan auditor dalam memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *big 4* maka akan memberikan kepercayaan lebih kepada stakeholders karena KAP *big 4* dipandang

lebih kredibel dibandingkan dengan KAP non big 4 (Wicaksono, 2011). Pernyataan ini didukung dengan penelitian Iatridis dan Alexakis (2012) yang memperoleh bukti bahwa secara umum perusahaan yang melakukan pengungkapan sukarela diaudit oleh KAP big 4. Murcia dan Santos (2012) berpendapat bahwa auditor cenderung melakukan pengungkapan semaksimal mungkin untuk mengurangi biaya litigasi karena kekurangan informasi.

Perusahaan jika ingin di pandang baik oleh masyarakat hendaknya menyajikan laporan keuangan yang baik dan kredibel. Dengan menyewa auditor dari KAP big 4 dapat dihasilkan laporan yang baik. Karena KAP big 4 tersebut tidak akan mau diajak kompromi dengan pihak-pihak yang ingin memanipulasi laporan keuangan tersebut demi menjaga nama baik dan kredibilitas KAP tersebut di masyarakat. Dari segi perusahaan, manajemen ingin mengungkapkan informasi sukarelanya lebih luas dikarenakan ingin mendapatkan hasil audit yang *unqualified* (wajar tanpa pengecualian) dari auditor KAP *big 4*. Dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP big 4 maka akan memberikan kepercayaan lebih kepada *stakeholders* karena KAP *big 4* dipandang lebih kredibel dibandingkan dengan KAP non big 4. (Bintang, 2011).

Hal ini didukung oleh penelitian Noor Laila (2014) dan Nurseto Adhi (2015) yang mengatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela

2.2.6 Umur *Listing* terhadap luas pengungkapan sukarela

Umur perusahaan diukur sejak perusahaan tersebut didirikan berdasarkan akta pendirian perusahaan di Indonesia. Semakin lama umur perusahaan maka kemungkinan memberikan informasi yang lebih banyak dibandingkan perusahaan yang baru berdiri. Informasi yang banyak tersebut akan bermanfaat bagi investor dalam mengurangi tingkat ketidakpastian perusahaan, sehingga investor dapat menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi (Kartika, 2009).

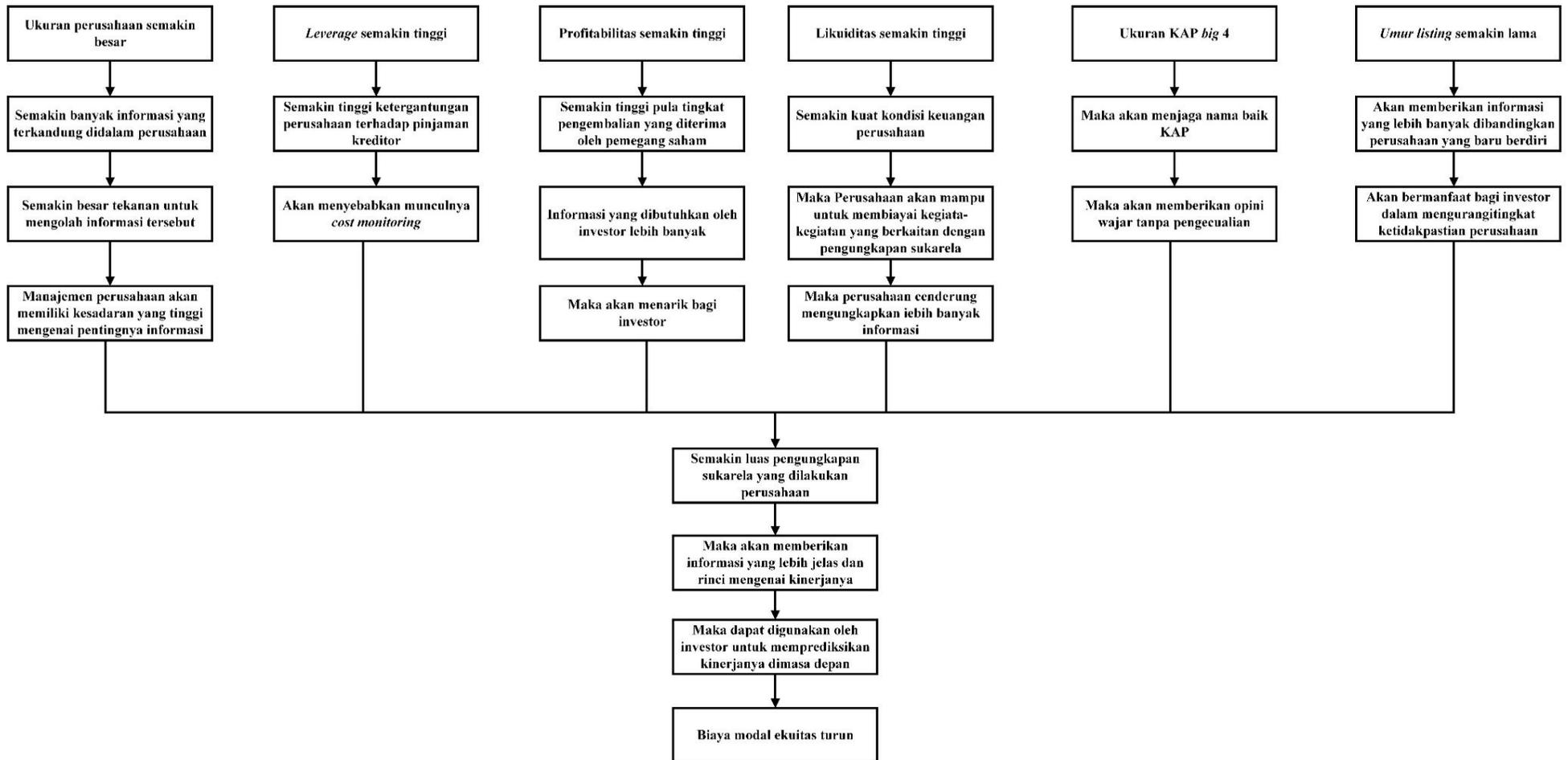
Prayogi (2003) menyatakan bahwa umur *listing* berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela perusahaan. Alasan yang mendasari adalah semakin besar jumlah umur perusahaan akan lebih berpengalaman dalam penyusunan laporan keuangan (Prayogi, 2003). Perusahaan yang lebih lama *listing* di bursa efek memiliki pengetahuan yang lebih banyak mengenai kebutuhan informasi investor. Penelitian yang dilakukan Hossain dan Hammami juga memperoleh hasil bahwa umur *listing* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu semakin tua umur perusahaan akan semakin luas pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan (Prayogi, 2003).

Hal ini didukung oleh penelitian Nurseto Adhi (2012), dan Noni Fitriani (2016), mengatakan bahwa umur *Listing* berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.

2.2.7 Luas Pengungkapan Sukarela terhadap biaya modal ekuitas

Biaya modal ekuitas merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan akan diterima oleh pemegang saham di masa depan. Biaya modal berbanding lurus dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh investor. Ketika menghadapi risiko (ketidakpastian) yang tinggi, tentunya investor berharap mendapatkan pengembalian yang tinggi pula. Untuk menurunkan biaya modal ekuitas, perusahaan tentunya harus menurunkan tingkat ketidakpastian yang dihadapi oleh investor. Oleh karena itu, perusahaan melakukan pengungkapan sukarela dengan tujuan memberikan informasi yang lebih jelas dan rinci mengenai kinerjanya. Informasi tambahan tersebut dapat digunakan oleh investor untuk memperkirakan kinerja perusahaan di masa depan sehingga dapat menurunkan tingkat ketidakpastian dan biaya modal ekuitas yang ditanggung perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Botosan (1994) dan Febrian (2007) menunjukkan bahwa pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh manajemen dapat menurunkan biaya modal ekuitas.

Hal ini didukung oleh penelitian Luh Putu Kartika Sari Dewi, Made Arie Wahyuni, dan Edy Sujana (2017), Sri Hermuningsih (2016), Aprilia Whetyningtyas (2014), Putu Prima Wulandari dan Sari Atmini (2012), H. Armadi dan Mariska Dewi Anggraeni (2010), dan Ibnu Abni Lahaya (2017) yang mengungkapkan bahwa pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas, artinya semakin luas pengungkapan sukarela dilakukan maka biaya modal ekuitas akan turun.



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

- H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela
- H2 : *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela
- H3 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela
- H4 : Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela.
- H5 : Ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela
- H6 : Umur *listing* perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela
- H7 : Luas pengungkapan sukarela berpengaruh signifikan terhadap biaya modal Ekuitas

